



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2021**

**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN BANJAR
TAHUN 2022**

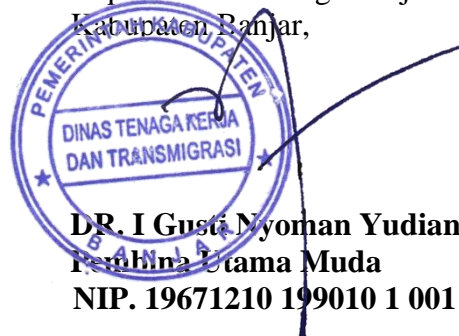
KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat petunjuk dan hidayahnya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2021 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Banjar.

Didalam Laporan Kinerja ini mengacu pada RPJMD dan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021. Dalam penyusunan laporan kinerja ini masih terdapat banyak kesalahan, kekurangan maupun kekeliruan baik dalam teknik penyusunan maupun pengumpulan data dan diharapkan dapat digunakan sebagai arah dan pedoman serta perbaikan kinerja bagi yang berkompeten.

Semoga laporan kinerja ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, khususnya bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar dan Pemerintah Kabupaten Banjar pada umumnya.

Martapura, Februari 2021
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Banjar,



DR. I Gusti Nyoman Yudiana, M.Si
Perhimpunan Utama Muda
NIP. 19671210 199010 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

- Sebelumnya Pencari Kerja untuk membuat AK1 datang langsung ke tempat, dengan adanya Website Banjar Kerja sekarang bisa di akses dimana saja.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar berkontribusi untuk mewujudkan Misi ke-2 (dua) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar sesuai kewenangan yang dimilikinya yakni Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berbasis pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan kesejahteraan sosial

Pada misi ke-2 (kedua) untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbasis pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan kesejahteraan sosial Dinas Tenaga kerja dan transmigrasi mempunyai tujuan untuk menurunkan Pengangguran Terbuka dengan sasaran meningkatkan kompetensi tenaga kerja dengan program kerja yang dilaksanakan :

1. Program Pelatihan Kerja dan produktivitas tenaga kerja
2. Program Penempatan Tenaga Kerja

Untuk pencapaian pada Misi 2 (dua) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Banjar menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD yaitu Persentase Peningkatan Pencari Kerja yang ditempatkan dan Persentase Penurunan Sengketa Industrial.

1. Persentase Peningkatan Tenaga Kerja yang ditempatkan

Definisi Operasional adalah pencari kerja yang mencari pekerjaan yang ditempatkan dalam dunia kerja baik di Pemerintahan, BUMN, BUMD ataupun perusahaan dan tenaga kerja, untuk Tahun 2021 Target yang ditetapkan adalah sebesar 3% realisasi sebesar 58% dikarenakan pada Tahun 2021 ini terdapat kenaikan penempatan tenaga kerja yang ditempatkan sejumlah 363 orang dari kegiatan :

- Pekerja Kontrak waktu Tertentu (PKWT) 217 Orang
- Informasi Pasar Kerja (IPK) 146

Tahun 2021 penempatan tenaga kerja sebesar 363 orang.

2. Persentase Penurunan Sengketa Industrial

Definisi Operasional adalah sengketa antar pekerja dengan pemberi kerja baik berupa Pemutusan Hubungan Kerja, perselisihan hubungan Industrial, perselisihan hak dan kewajiban pekerja dan pemberi kerja. Target tahun 2021 sebesar 8% realisasi sebesar 0,5%, tahun ini situasi hubungan industrial sangat cukup baik yaitu ada 14 kasus yang melaporkan sengketa hubungan industrialnya dibandingkan dengan Tahun 2020 ada 21 kasus yang mendaftarkan sengketa hubungan industrialnya dikarenakan pada tahun 2020 ini adanya pandemi covid 19 banyak perusahaan yang merumahkan atau mem PHK pekerja nya. Penekanan penurunan sengketa industrial ini didukung dengan kegiatan :

1. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota
2. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan di Daerah Kabupaten / Kota

BAB I PENDAHULUAN

A. MAKSUD DAN TUJUAN LAPORAN

A.1 Maksud Laporan

1. Salah satu bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar selama kurun waktu 1 tahun.
2. Memberikan Informasi Perkembangan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar.
3. Memberikan Informasi Perkembangan Realisasi Fisik dan Keuangan yang dikelola Pemerintah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar.
4. Menemukan alternatif pemecahan permasalahan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

A.2 Tujuan Laporan

1. Untuk salah satu alat untuk mendapatkan masukan Stakeholder demi perbaikan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar.
2. Menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.
3. Sebagai Sarana Laporan Pelaksanaan tugas Pemerintah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar kepada Bupati.
4. Sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Guna memantapkan pelaksanaan kewenangan dibidang (Urusan yang diampu SKPD) , maka berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh (SKPD) Kabupaten Banjar berlandaskan pada beberapa pedoman sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang ketenagakerjaan
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banjar; dan
6. Peraturan Bupati Banjar Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

B.1 KEDUDUKAN :

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab Kepada Bupati melalui Sekeretaris Daerah.

B.2 TUGAS :

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab Kepada Bupati melalui Sekeretaris Daerah.

B.3 FUNGSI :

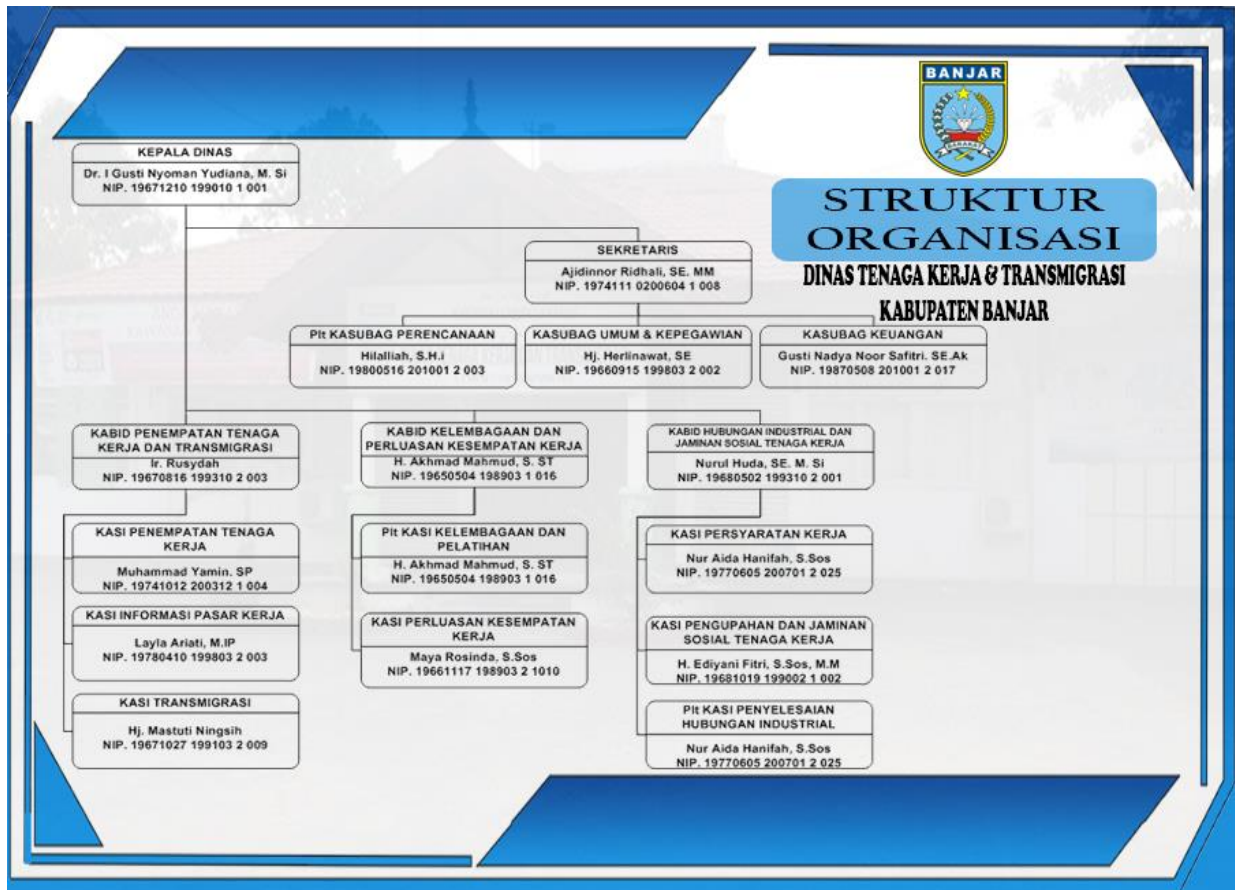
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
- b. Pembinaan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang penempatan tenaga kerja, perluasan kerja dan produktivitas tenaga kerja;
- c. Pembinaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan hubungan industrial;
- d. Pemberian pelayanan umum bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- e. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya Susunan organisasi SKPD terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - Sub Bagian Perencanaan
 - Sub Bagian Keuangan ;
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Penempatan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari :
 - Seksi Penempatan Tenaga Kerja ;
 - Seksi Informasi Pasar Kerja
 - Seksi Transmigrasi
4. Bidang Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, terdiri dari :
 - Seksi Hubungan Industrial;
 - Seksi PerSyaratn Kerja

- Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
5. Bidang Kelembagaan dan Perluasan Kesempatan Kerja terdiri dari
- Seksi Kelembagaan dan Pelatihan
 - Seksi Perluasan dan Kesempatan Kerja



Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar

C. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Tujuan yang ingin dicapai adalah Menurunnya Angka Pengangguran di Kab. Banjar yang diawali dengan meningkatnya persentase tenaga kerja yang ditempatkan dan menurunnya persentase sengketa hubungan industrial. Tujuan ini sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi yang mengurus ketenagakerjaan yang membantu Kepala Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Identifikasi permasalahan ketenagakerjaan dilakukan melalui proses analisis pohon masalah ketenagakerjaan kemudian diperoleh mapping matriks masalah pokok, masalah dan akar masalah. Sehingga hirarki permasalahan tersusun secara "cascading" (berjenjang) dan disajikan dalam bentuk diagram pohon masalah.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi masih menghadapi permasalahan yaitu masih Tingginya angka pengangguran dan kualitas produktivitas tenaga kerja yang rendah

Tabel I
Tabel Permasalahan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

No.	Pokok Masalah	Masalah	Akar Maslah
1.	Rendahnya kesempatan/lapangan kerja	Kurangnya kerjasama dengan penyedia lapangan kerja	Kurangnya fasilitasi penyediaan lapangan kerja
		Rendahnya kapasitas dan kompetensi tenaga kerja	Rendahnya tenaga kerja yang terampil dan professional
2.	Memburuknya hubungan industrial	Perlindungan dan Advokasi Kepentingan tenaga Kerja	Menjaga keharmonisan hubungan industrial
			Fasilitasi penyelesaian hubungan industrial

D. ISU STRATEGIS

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Beberapa isu strategis yang dihadapi dalam pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian antara lain :

Ketenagakerjaan

1. Masih tingginya angka pengangguran terbuka dan rendahnya kualitas angkatan kerja dibandingkan kebutuhan industri, perdagangan dan jasa melalui pelatihan dan pemagangan untuk meningkatkan bidang :
 - Pendidikan
 - Keterampilan
 - Attitude
2. Masih terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia menyebabkan pengangguran terus bertambah
3. Perlunya perbaikan system hubungan industrial perusahaan yang harmonis untuk mewujudkan ketenangan berusaha dan nyaman bekerja diantaranya :

- a. Pendidikan dan penyuluhan hubungan industrial perusahaan untuk seluruh tenaga kerja dalam rangka meningkatkan pemahaman peraturan ketenagakerjaan dan penerapannya
- b. Pembentukan LKS Bipartit dan berfungsinya LKS Bipartit
- c. Terbentuk dan berfungsinya serikat pekerja
- d. Perbaikan syarat syarat kerja ; pembuatan peraturan perusahaan dan Perjanjian kerja bersama
- e. Perselisihan dan Unjuk rasa
- f. Penyelesaian perselisihan oleh mediator maupun melalui perjanjian bersama di Pengadilan Hubungan Industrial
- g. Penyempurnaan sitem pengupahan
- h. Penyuluhan Jaminan Sosial

Faktor-faktor eksternal dan internal lainnya yang turut memberikan kontribusi terhadap permasalahan ketenagakerjaan, adalah : kurangnya arus masuk modal asing yang sifatnya padat karya, lemahnya iklim investasi dalam menghadapi pasar global, berbagai perilaku birokrasi dan regulasi yang tidak kondusif bagi pengembangan usaha sehingga tidak mendukung penciptaan lapangan kerja baru, rendahnya pendidikan dan produktivitas tenaga kerja, tekanan kenaikan upah bagi beberapa perusahaan yang belum stabil.

Ketransmigrasian

1. Adanya kesenjangan pembangunan antar wilayah karena terbatasnya aksesibilitas;
2. Rendahnya kualitas SDM, terutama di perdesaan warga eks transmigrasi
3. Kurangnya keterkaitan antara kawasan perdesaan sebagai hinterland dengan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan ekonomi;
4. Belum terintegrasi dan terkoordinasikannya program-program antarsektor dalam pembangunan kawasan transmigrasi, baik antar pemerintah pusat, antar pemerintah daerah, maupun antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar Tahun 2021 disusun sebagai berikut :

Kata Pengantar;

Daftar Isi;

Ringkasan Eksekutif;

Pada Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan tentang latar belakang, Kedudukan, Tugas Pokok dan fungsi (struktur organisasi), Aspek Strategis dan permasalahan utama.

Bab II Perencanaan dan Perjanjian/Penetapan Kinerja

Menjelaskan tentang Rencana Strategis dan Perjanjian/Penetapan Kinerja Tahun 2019

Bab III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2021

Menjelaskan Capaian Kinerja Organisasi tahun 2021 dan Realisasi Anggaran Tahun 2021.

Bab IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan dan Saran

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Selanjutnya indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar mengampu urusan Ketenagakerjaan. Berdasar urusan dan program yang diampu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mendukung pencapaian misi ke-2 Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berbasis pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan kesejahteraan sosial.

Pengukuran pencapaian misi dapat dilihat melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dilengkapi dengan indikator-indikator kinerja sasaran. Keseluruhan indikator kinerja utama untuk meningkatkan tenaga kerja yang ditempatkan dan menurunkan Sengketa Industrial sebanyak 2 (Dua) indikator.

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Indikator Program	Indikator Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Sumber Data
1	Meningkatnya Kesempatan/Lapangan Kerja	Persentase Peningkatan Tenaga Kerja Yang Ditempatkan	Tenaga Kerja adalah pencari kerja yang mencari pekerjaan yang ditempatkan dalam dunia kerja baik di Pemerintahan, BUMN, BUMD ataupun Perusahaan	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan Tahun N dibagi Jumlah pencari yang ditempatkan di Tahun N1 dikali 100%				APBD
					Program Penempatan Tenaga Kerja			
						Peningkatan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota		
							Peningkatan Perlindungan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran	
						Penerbitan Perpanjangan IMTA Yang Lokasi Kerja Dalam 1		

						(Satu) Daerah Kabupaten /Kota		
							Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	
						Pengelola Informasi Pasar Kerja		
							Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	
							Job Fair/Bursa Kerja	
						Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja		
							Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	
							Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan	

							Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	
						Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		
							Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	
						Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota .		
							Pelatihan Transmigrasi	
2	Membbaiknya Hubungan Industrial	Persentase Penurunan Sengketa Industrial	Sengketa Industrial adalah sengketa antar pekerja dengan pekerja baik berupa Pemutusan Hubungan Kerja, Perselisihan Hubungan Industrial, Perselisihan Hak dan Kewajiban	Jumlah kasus hubungan industrial tahun N1 dikurang jumlah kasus hubungan industrial tahun N dibagi jumlah kasus hubungan industrial tahun N di kali 100%				APBD

					Program Hubungan Industrial			
						Pengesahaan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanyar Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota		
							Penyellen ggaran Pendataa n dan Informas i Sarana Hubunga n Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja sertan Pengupa han	
							Pengesahaan Peraturan Perusaha an Bagi Perusaha an	
						Pencegaha n dan Penyelesai an Perselisihan Hubungan		

						Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten /Kota	
						Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota	

Sumber : Surat Keputusan IKU SKPD

B. PERJANJIAN KINERJA

Penyusunan perjanjian kinerja tahun 2021 mengacu pada Renstra Perubahan Tahun 2016-2021. Secara garis besar perjanjian kinerja tahunan tahun 2021 meliputi (1) sasaran strategis, dengan pengukuran pencapaian sejumlah sasaran tersebut dilakukan melalui (1) indikator kinerja sasaran beserta targetnya. Perjanjian kinerja telah ditetapkan secara berjenjang (pohon kinerja) mulai dari eselon II, eselon III dan eselon IV sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2
Penetapan Kinerja Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatnya kesempatan/lapangan kerja	1. Persentase peningkatan tenaga kerja yang di tempatkan	%	3 %	a. Program Penempatan Tenaga Kerja	a. Persentase peningkatan peluang kerja baru	%	5 %		
					i Kegiatan : Pengelola Informasi Pasar Kerja	i.	Orang	1500	148.591.600	
					Sub Kegiatan : Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online		Orang	1500	143.494.000	
					Sub Kegiatan : Job Fair/Bursa Kerja		Sekolah	5	5.097.600	
					i Kegiatan : Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota		Persen	3%	56.975.900	
					Sub Kegiatan : Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran		Orang	4	56.975.900	
					i Kegiatan : Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persen	3%	32.781.700	
					Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi		Orang	5	32.781.700	

						Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota						
						i Kegiatan : Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persen	3%	52.322.400		
						Sub Kegiatan : Pelatihan Transmigrasi		Orang	32	52.322.400		
						b. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	b.	Persentase pencari kerja yang memiliki sertifikat kompetensi	%	1 %		
						i Kegiatan : Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi		Persen	1	95.749.600		
						Sub Kegiatan : Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Persen	1	72.236.900		
2.	Membaiiknya Hubungan Industrial	2.	Persentase Penurunan Sengketa Industrial	8%		c. Program Hubungan Industrial	c.	Persentase sengketa industrial yang diselesaikan	%	100 %	-	
						i Kegiatan : Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	i		Orang	200	61.677.700	
						Sub Kegiatan : Pengesahan Peraturan Perusahaan Bagi Perusahaan		Perusahaan	20	31.475.000		
						Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi		Buah	90	30.202.700		

						Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Serta Pengupahan						
						i Kegiatan : Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota			Kasus	15	34.545.700	
						Sub Kegiatan : Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			Kasus	15	34.545.700	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

A.1 TARGET DAN REALISASI KINERJA SASARAN TAHUN 2021

Terdapat beberapa tahapan di dalam melakukan pengukuran kinerja, tahapan yang pertama adalah penetapan kinerja, pengumpulan data kinerja, dan cara pengukuran kinerja. Untuk penetapan kinerja telah dimuat dalam bab II mengenai rencana kinerja tahun 2021.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan sumber data kinerja yang diperoleh dari data internal instansi dan data eksternal yang berasal dari luar instansi baik berupa data primer maupun sekunder.

Pengukuran kinerja mencakup; kinerja kegiatan yang merupakan tingkat capaian target dari masing-masing indikator (masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak), dan kinerja sasaran yakni tingkat pencapaian sasaran dengan indikator yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja.

Untuk mengukur kinerja sasaran pengukuran kinerjanya dilakukan dengan memperhatikan kondisi masing-masing capaian kegiatan, menggunakan rumus :

- Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator kinerja} = (\text{Realisasi} / \text{Rencana}) \times 100 \%$$

- Jika Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, untuk kondisi demikian digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator kinerja} = ((\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana}) / \text{Rencana})) \times 100 \%$$

DISNAKERTRANS Kab. Banjar telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja DISNAKERTRANS Kab. Banjar tahun 2017 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja seperti dijelaskan pada table berikut.

Tabel 3.1
Skala Nilai Perangkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$\geq 100\%$	Berhasil	Hijau
2	$70\% < 100\%$	Cukup Berhasil	Biru
3	$40\% < 70\%$	Kurang Berhasil	Kuning
4	$< 40\%$	Tidak Berhasil	Merah

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh (SKPD)Kab. Banjar dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis (SKPD)Kab. Banjar beserta target dan capaian realisasinya dirinci dalam table berikut :

Tabel 3.2
Realisasi Kinerja DISNAKERTRANS Tahun 2021

Sasaran Strategis/Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Cara Perhitungan Indikator	Target		Realisasi	Capaian (%)	Predikat
			Satuan	Tahun 2021			
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8
Meningkatnya kesempatan lapangan Kerja	Persentase Peningkatan Pencari Kerja yang ditempatkan	Persentase pencari kerja yang ditempatkan Tahun N dibagi persentase pencari	%	3	58%	1.933 %	Berhasil

		yang ditempatkan di Tahun N1 dikali 100%					
	Program Penempatan Tenaga Kerja		%	5	91%	1,820 %	Berhasil
	Kegiatan : Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		Orang	700	955 Orang	136%	Berhasil
	Sub Kegiatan : Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online		Orang	700	955 Orang	136%	Berhasil
	Sub Kegiatan : Job Fair/Bursa Kerja		Sekolah	5	5 Sekolah	100%	Berhasil
	Kegiatan : Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/ Kota		Persen	3	3%	100%	Berhasil
	Sub Kegiatan : Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja		Orang	4	4 Orang	100%	Berhasil

	migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran						
	Kegiatan : Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Persen	3	3%	100%	Berhasil
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota		Orang	5	5 Orang	100%	Berhasil
	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja		%	1	1 %	100 %	Berhasil
	Kegiatan : Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi		Persen	1	1%	100%	Berhasil
	Sub Kegiatan : Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampil		Orang	32	32 Orang	100%	Berhasil

	an Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi						
	Kegiatan : Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Persen	1	1%	100%	Berhasil
	Sub Kegiatan : Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Orang	16	22 Orang	137,5 %	Berhasil
	Kegiatan : Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota (Pelatihan Transmigrasi)		Persen	3	3%	100%	Berhasil
	Sub Kegiatan : Pelatihan Transmigrasi		Orang	32	32 Orang	100%	Berhasil
Membaiknya Hubungan Industrial	Persentase Penurunan Sengketa Hubungan Industrial	Jumlah kasus hubungan industrial tahun N1 dikurangi jumlah kasus hubungan industrial tahun N dibagi Jumlah	%	8	50 %	625%	Berhasil

		kasus N di kali 100%					
	Program Hubungan Industrial		%	100	100%	100 %	Berhasil
	Kegiatan : Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftara n Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Orang	200	200 Orang	100%	Berhasil
	Sub Kegiatan : Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan		Perusaha an	20	26 Perusaha an	130%	Berhasil
	Sub Kegiatan : Penyelengg araan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Serta		Perusaha an / Orang	90	“ Dana nya di Refocusi ng”	-	

	Pengupahan						
	Kegiatan : Pencegahan Dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota		Kasus	15	14	93,3 %	Berhasil
	Sub Kegiatan : Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Kasus	15	14 Kasus	93,3 %	Berhasil

ilustrasi gambar/grafik



A.2 PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

Perjanjian Kinerja Tahun 2020 merupakan bagian dari kinerja strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar sebagaimana yang tercantum pada perubahan Renstra Periode Tahun 2016-2021. Pencapaian kinerja dengan tahun sebelumnya untuk mengetahui kecenderungan/trend meningkat atau menurun dari tahun sebelumnya. Perbandingan antara realisasi/capaian kinerja Tahun 2020 dengan Tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan antara realisasi/capaian kinerja Tahun 2021 dengan Tahun sebelumnya

No	Indikator Kinerja Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (PERUBAHAN 2021)	Cara Perhitungan Indikator	Satuan	2018		2019		2020		2021	
					Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Angka Pengangguran Terbuka				2,54	3,03	Tidak Menjadi Indikator lagi	Tidak Menjadi Indikator lagi	Tidak Menjadi Indikator lagi	Tidak Menjadi Indikator lagi	Tidak Menjadi Indikator lagi	Tidak Menjadi Indikator lagi
2	Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat di kawasan				20%	20%	Tidak Menjadi Indikator lagi	Tidak Menjadi Indikator lagi	Tidak Menjadi Indikator lagi	Tidak Menjadi Indikator lagi	Tidak Menjadi Indikator lagi	Tidak Menjadi Indikator lagi

	transmigrasi											
3	Persentase peningkatan Penempatan Tenaga Kerja yang ditempatkan		Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan Tahun N dibagi persentase jumlah pencari kerja yang ditempatkan Tahun N1 dikali 100%	Persen			3,05 %	3,05 %	5,2 %	2,6 %	58%	1.933%
	Program Penempatan Dan Perluasan Kesempatan Kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja							47%	9,4%	91%	1.820%
	Penanganan Pekerja Migran	Kegiatan : Pengelolaan Informasi Pasar Kerja							4 Orang	4 Orang	955 Orang	136%
		Sub Kegiatan : Pelayanan dan Penyediaan									955 Orang	136%

		Informasi Pasar Kerja Online										
		Sub Kegiatan : Job Fair/Bursa Kerja									5 Sekolah	100%
	Penanganan Perusahaan yang Mempekerjakan TKA	Kegiatan : Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota						5 Orang	5 Orang		3%	100%
		Sub Kegiatan : Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)									4 Orang	100%
	Bursa Kerja Khusus	Kegiatan : Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota)						4 Sekolah	4 Sekolah		3%	100%

		Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota									5 Orang	100%
	Bursa Kerja Online							1018 Orang	1018 Orang			
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja						1,46%	1,46%		1%	100%
	Upaya Penciptaan Wira Usaha Baru	Kegiatan : Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi						15 Orang	15 Orang		1%	100%
		Sub Kegiatan : Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari									32 Orang	100%

		Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi										
	Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja	Kegiatan : Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta						16 Orang	16 Orang	1%	100%	
		Sub Kegiatan : Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta								22 Orang	137,5%	
	Pelatihan Warga Ex.Trans migrasi	Kegiatan : Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (satu)Daerah Kabupaten/Kota						32 Orang	32 Orang	3%	100%	
		Sub Kegiatan : Pelatihan Transmigrasi								32 Orang	100%	
4	Persentase Penurunan Sengketa Industrial		Jumlah kasus hubungan industrial tahun N1 dikurang jumlah kasus	Persen			0,58 %	6 %	6 %	86%	50%	625%

			hubungan industrial tahun N dibagi Jumlah kasus N di kali 100%									
	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Program Hubungan Industrial						100%	100%	100%	100%	
	Fasilitas Penyelesaian Prosedur, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Kegiatan : Pencegahan dan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota						21 Kasus	21 Kasus	14 Kasus	93,3%	
		Sub Kegiatan : Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,								14 Kasus	93,3%	

		Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota										
	Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanan Tentang Ketenagakerjaan	Kegiatan : Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						200 Perusahaan	200 Perusahaan		200 Orang	100%
		Sub Kegiatan : Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan									26 Perusahaan	100%
		Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan									-	-

		Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Serta Pengupahan										
	Fasilitas Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Soisial Ketenagakerjaan							30Dokumen	22 Dokumen			

Nb : Indikator yang masih digunakan dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya

Tabel 3.4

Matrik Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.Banjarnegara beserta Rencana Pendanaannya Tahun 2016-2021

SKPD : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcam) dan Kegiatan (Output)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Perubahn 2021)	Indikator Kinerja Program (Outcam), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode	Lokasi (Disipada ke gata u pro gram yan g oby ek/ sas aranya des /ke c)
											2018		2019		2020		2021			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
- Meningkatkan Pengalaman Ajaran Agama dan Suasana Kehidupan Beragam	Menurunkan Angka Penggangguran	Tingkat Penggangguran Terbuka																		

<p>- Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berbasis Pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Sosial</p>																				
<p>- Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Pertanian, Perkebunan, Perternakan, Perikanan dan Komoditas Unggulan Daerah Lainnya Dengan Pendekatan Agribisnis Dan Industri Berwawasan Lingkungan Secara Berkelanjutan</p>																				

			Meningkat nya Kesempat an / Lapangan Kerja	Persentas e Peningkat an Tenaga Kerja yang ditempat kan																		
							PROGRAM PENEMPATA N TENAGA KERJA		%											5%	238.349.200	
							Kegiatan : Pengelolaa n Informasi Pasar Kerja		Orang												700 Orang	148.591.600
							Sub Kegiatan : Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online		Orang												700 Orang	143.494.000
							Sub Kegiatan : Job Fair/Bursa Kerja		Sek olah												5 Sek olah	5.097.600

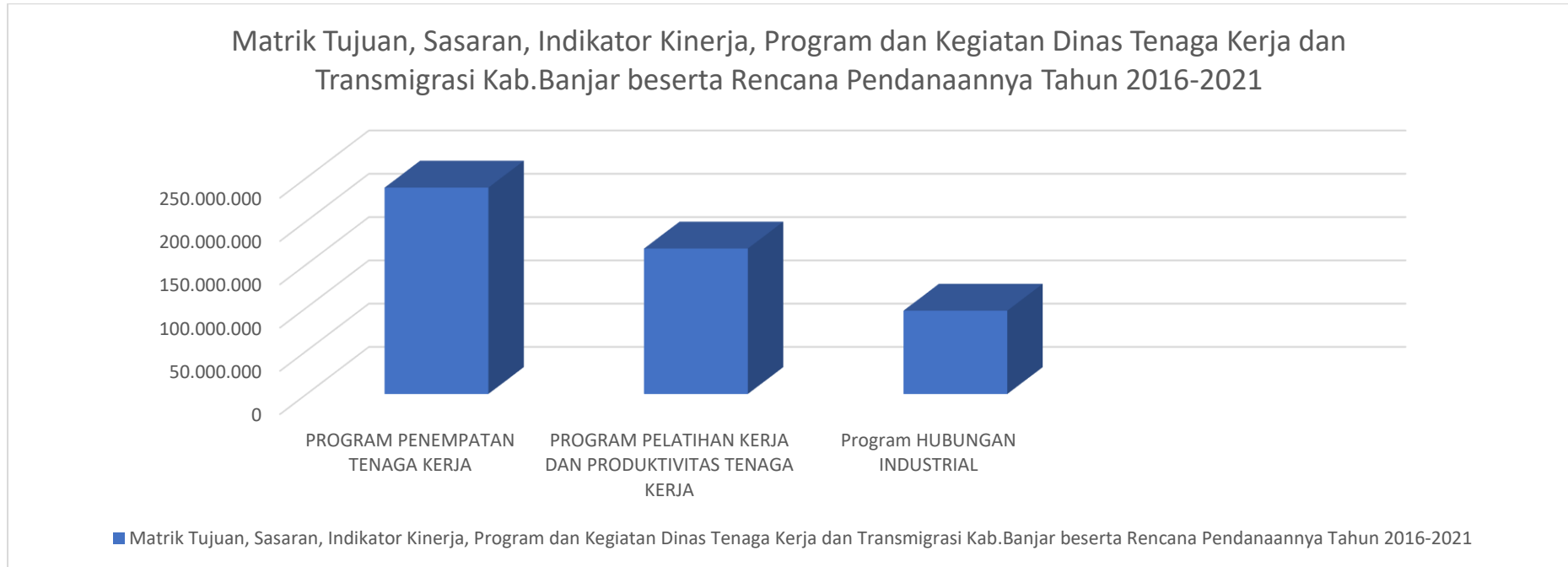
							Kegiatan : Perlindungan PMI (Pradana dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/ Kota		%									3%	56.975.900			
							Sub Kegiatan : Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)		Orang										4 Orang	56.975.900		
							Kegiatan : Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		%										3%	32.781.700		
							Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota		Orang										5 Orang	32.781.700		

							Kegiatan : Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		%									3%	52.322.400			
							Sub Kegiatan : Pelatihan Transmigra si		Or ng										32 Or ng	52.322.400		
							PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIV ITAS TENAGA KERJA		%										1%	167.986.500		
							Kegiatan : Pelaksanaa n Pelatihan Berdasarka n Unit Kompetensi		%										1%	95.749.600		
							Sub Kegiatan : Proses Pelaksanaa n Pendidikan dan Pelatihan Keterampil an Bagi Pencari		Or ng										32 Or ng	95.749.600		

					Bursa Kerja Onlie	Jumlah pencari kerja yang terdaftar secara online			Orang				2500	1000	12.078.000	2500				
					Pelatihan warga Ex. Transmigrasi	Jumlah warga Eks Transmigrasi yang dilatih			Orang				48	16	31.276.000	48				
					Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang memiliki sertifikat kompetensi			%				1%	1%	107.906.024	1%				
					Upaya Penciptaan Wira Usaha Baru	Jumlah orang yang menjadi wira usaha baru			Orang				15	15	40.541.274	20				
					Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja	Jumlah orang yang sudah mengikuti pelatihan keterampilan			Orang				80	16	36.088.750	80				
			Membai kn ya Hubungan Industrial	Persentas e Penuruna n Sengketa Industrial									6%	7%		8%				

					Program Perlindungan dan Pengembang an Lembaga Ketenagakerj aan	Persentase Sengketa Industrial Yang Diselesaikan			%				10 0%	10 0%	135.833.9 20	100 %				
					Fasilitas Penyelesaian Prosedur, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Jumlah Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang selesai ditangani			Kas us				20	20	97.270.540	30				
					Fasilitas Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerj aan	Jumlah PP/PKB/PKWT/P ermenaker 19/2012 sesuai aturan			Dok um en				30	30	33.490.400	35				
					Sosialisasi Berbagai Peaturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerj aan	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan sosialisasi tentang peraturan ketenagakerjaan			Per usa haa n				200	200	5.072.980	200				

Ilustrasi gambar/grafik



Note : Data Pagu Kerangka Pendanaan yang di ambil untuk grafik tahun 2021

A.3 REALISASI KINERJA TAHUN 2021 DAN TARGET KINERJA SASARAN TAHUN AKHIR PERIODE RENSTRA

Indikator kinerja sasaran Tahun 2021 merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra Periode Tahun 2016-2021. Pencapaian kinerja tahun 2021 Perubahan Renstra dengan capaian kinerja tahun terakhir periode Perubahan Renstra 2021, untuk mengetahui kemampuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar selama 1 (satu) tahun kedepan dalam mencapai target akhir periode. Perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2021 dan Target Periode Akhir Renstra adalah sebagai berikut :

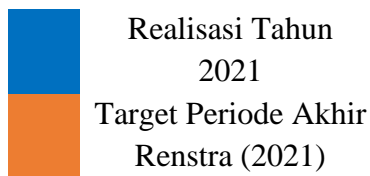
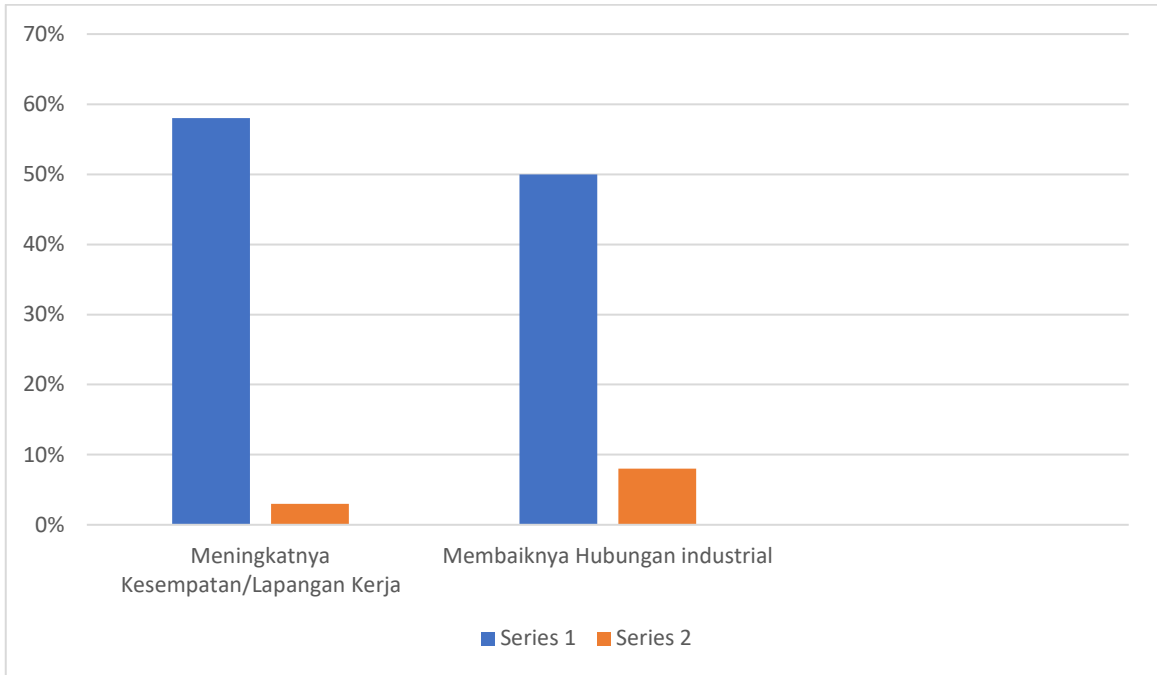
Tabel 3.5
Realisasi Kinerja Tahun 2021 dan Target Periode Akhir

Sasaran Strategis/Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Cara Perhitungan Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2021	Target Periode Akhir Renstra (2021)	Capaian Periode Akhir Renstra (2021)
1	2	3	6	7	8	9=7/8
Meningkatnya Kesempatan/Lapangan Kerja	Persentase Peningkatan Tenaga Kerja yang ditempatkan	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan Tahun N dibagi Jumlah pencari kerja yang ditempatkan di Tahun N1 di kali 100%	Persen	58%	3%	1.933%
	Program : Penempatan Tenaga Kerja		Persen	91 %	5%	1,820%
	Kegiatan : Pengelola Informasi Pasar Kerja		Orang	955 Orang	700 Orang	136%
	Sub Kegiatan : Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online		Orang	955 Orang	700 Orang	136%
	Sub Kegiatan : Job Fair / Bursa Kerja		Sekolah	5	5	100%
	Kegiatan : Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota		Persen	3	3%	100%
	Sub Kegiatan : Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) / Pekerja Migran		Orang	4	4 Orang	100%

	Kegiatan : Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persen	3	3%	100%
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota		Orang	5	5 Orang	100%
	Program : Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja		Persen	1	1%	100%
	Kegiatan : Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi		Persen	1	1%	100%
	Sub Kegiatan : Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi		Orang	32	32 Orang	100%
	Kegiatan : Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Persen	1	1%	100%
	Sub Kegiatan : Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Orang	22	16 Orang	137,5%
	Kegiatan : Penataan Pensebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Persen	3	3%	100%
	Pelatihan Transmigrasi		Orang	32	32 Orang	100%
Membbaiknya Hubungan Industrial	Persentase Penurunan sengketa industrial	Jumlah Kasus	Persen	50%	8%	625%
	Program : Hubungan Industrial		Persen	100%	100%	100%
	Kegiatan : Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Orang	200	200 Orang	100%
	Sub Kegiatan : Pengesahan Peraturan Perusahaan Bagi Perusahaan		Perusahaan	26	20 Perusahaan	130%
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Serta Pengupahan		Perusahaan / Orang		“ Dana nya di Refocusing”	-
	Kegiatan : Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		Kasus	14	15 Kasus	93,3%
	Sub Kegiatan : Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang		Kasus	14	15 Kasus	93,3%

	Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					
--	--	--	--	--	--	--

Sumber :
 Ilustrasi gambar/grafik



B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN

Dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Banjar menggunakan 2 (dua) sasaran target kinerja Meningkatnya Kesempatan/Lapangan Kerja dan membaiknya hubungan Industrial. Sasaran tersebut akan dijabarkan sebagai berikut :

B.1 SASARAN 1. MENINGKATNYA KESEMPATAN/ LAPANGAN KERJA.

Sebagai upaya dalam menurunkan angka pengangguran, Kabupaten Banjar menetapkan kinerja untuk meningkatkan kesempatan kerja/lapangan kerja, kinerja diatas diukur dengan persentase peningkatan tenaga kerja yang ditempatkan. Pada Tahun 2021 terdaftar sejumlah 955 orang pencari kerja dengan jumlah pencari kerja yang di tempatkan sebanyak 363 orang dengan kata lain para pencari kerja yang ditempatkan sebesar 38%. Bila dibandingkan dengan kondisi Tahun 2020, dimana pencari kerja yang di tempatkan adalah 268 orang dengan jumlah pencari kerja sejumlah 1108 atau dengan persentase 24,1%. Kondisi 2 tahun terakhir tersebut menunjukkan kenaikan angka persentase tenaga kerja yang ditempatkan sebesar 13,9% dengan kata lain persentase tenaga kerja yang ditempatkan tumbuh 58% pada tahun 2021.

Bila dibandingkan dengan target Persentase peningkatan tenaga kerja yang ditempatkan yang ditetapkan pada tahun 2021 yaitu sebesar 3% maka capaian tahun 2021 adalah sebesar 19,3%. Indikator ini tidak bisa mencapai target yang ditetapkan dikarenakan laju pertumbuhan penduduk usia produktif yang siap bersaing mengisi peluang pasar kerja, yang cenderung terus meningkat namun pertumbuhan lapangan kerja baru masih belum memadai dengan kondisi tersebut. Sementara daerah sudah melakukan upaya dalam meningkatkan indikator dimaksud, adapun beberapa upaya yang telah dilakukan adalah meningkatkan Kesempatan Lapangan Kerja. Sedangkan kebijakannya yakni dengan Pelayanan Informasi Ketenagakerjaan melalui Penyebaran Informasi Tenaga Kerja. Sementara hal-hal lain yang menyebabkan kenaikan tenaga kerja yang ditempatkan adalah Menurunnya angka pencari kerja, masih rendahnya kualitas tenaga kerja, dan ketidaksesuaian kebutuhan antara tenaga kerja dengan dunia usaha dan industri. Berdasarkan permasalahan tersebut Kabupaten Banjar sangat membutuhkan Balai Latihan Kerja untuk memenuhi SDM yang terlatih, serta Mengadakan pelatihan sesuai kebutuhan pasar kerja, pembinaan dan penyuluhan bagi warga Transmigrasi untuk memberi bekal keterampilan agar bisa berwirausaha, mandiri dan memberikan Sosialisasi bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Tabel 3.5
Realisasi Indikator Peningkatan Penempatan
Tenaga Kerja Tahun 2021

Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
Persentase Peningkatan Tenaga Kerja yang di tempatkan	3 %	58 %	1,933 %

Berdasarkan data pada table 3,5 bahwa pencapaian kinerja meningkat 100% dari target yang ditetapkan dalam revisi Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Banjar.

Pada Revisi Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Banjar terdapat perubahan signifikan dari indikator kinerja dimana Indikator kinerja pada Tahun 2020 tidak relevan dengan sasaran strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Banjar untuk menurunkan angka pengangguran terbuka.

Faktor pendorong keberhasilan sasaran ini adalah :

- 1) Ada 5 kegiatan yang mendukung sasaran Persentase peningkatan tenaga kerja yang di tempatkan sebagai berikut :
 - a. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
 - b. Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota
 - c. Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - d. Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi
 - e. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
 - f. Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Penetapan indikator kinerja sasaran sudah berorientasi outcome dan dibuat secara berjenjang (cascading) sampai ke eselon terendah.
- 3) Seluruh indikator telah dilengkapi dengan baseline data dan cara penghitungannya.
- 4) Komitmen seluruh personil untuk meningkatkan kinerja.

Catatan penting dalam Pencapaian Sasaran :

- 1) Dalam rangka meningkatkan kualitas tenaga kerja yang mampu berdaya saing, Kab. Banjar tidak memiliki fasilitas Balai Latihan Kerja, walaupun ada 2 (dua) Pondok Pesantren yang mendapatkan BLK Komunitas, tetapi masih belum mampu menyerap untuk melatih pencari kerja dalam lingkup besar
- 2) Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kab. Banjar masih kesulitan dalam membatasi penyerapan tenaga kerja di lingkungan kerja Kab. Banjar khusus pencari kerja yang ada di Kab. Banjar, karena belum lengkapnya fasilitasi mengamodir dan menyalurkan tenaga kerja ke perusahaan, saat ini masih dalam tahap kemitraan dengan beberapa perusahaan.

Upaya perbaikan :

- 1). Koordinasi dengan perusahaan yang akan dikunjungi
- 2). Membuat Perencanaan Daftar kunjungan ke perusahaan
- 3). Sosialisasi kepada masyarakat baik melalui media cetak/banner (spanduk) dan sosial
- 4.) Melaksanakan kunjungan ke perusahaan dengan membawa berkas yang akan dibutuhkan.
- 1). Perlu dilakukan koordinasi dengan pihak terkait dan terhadap BKK yang sudah terdaftar
- 2). Perlu adanya kerjasama anatar BKK dan perusahaan dalam hal ini dinas/SKPD membantu memfasilitasi melalui pemagangan atau pelatihan kerja
- 3). Terlaksananya koordinasi dengan pihak terkait untuk pelaksanaan kerjasama dan pelayanan BKK
- Adanya kebijakan pemerintah tentang pengiriman PMI dimasa adaptasi kebiasaan baru, pemberitahuan negara yang membuka lowongan selain Timur Tengah terutama kawasan Asia Pasifik (Asia Timur).
- Koordinasi dengan instansi terkait TKA yang ada di wilayah kabupaten Banjar
- Kerjasama dalam pemulangan dan penelusuran keluarga PMI di wilayah Kabupaten Banjar.
- Jumlah TKA pendamping yang ada di perusahaan di sesuaikan
- Kedepanya diharapkan agar lebih selektif dalam melaksanakan seleksi peserta kegiatan, lebih dprioritaskan yang sudah lulus SMU/SMK/Sederajat maupun yang sudah lulus kuliah, dan juga pesertanya yang mau mengikuti kegiatan dengan bersungguh-sungguh

dengan tujuan menambah pengetahuan dan wawasan serta skill/keahlian dan untuk peserta yang akan mengikuti kegiatan pelatihan di masa mendatang, diutamakan masyarakat sekitar LPK/BLKK.

- Perlunya penambahan anggaran agar dapat melaksanakan kegiatan pelatihan warga Eks. Transmigrasi agar lebih maksimal dan dapat menambah pada indikator pada jumlah.

Tindak Lanjut yang akan datang :

1. Lebih memperluas publikasi kepada masyarakat baik melalui Media cetak/Banner (Spanduk) dan Sosial Media.
2. Membuat Akun Perusahaan sebagai Admin di Website Banjar Kerja agar publikasi lowongan menjadi lebih mudah.
3. Melakukan pembinaan atau pengembangan yang lebih focus kepada salah satu Bursa Kerja Khusus (BKK).
4. Memfasilitasi BKK dalam hal pemagangan atau Kerja sama dengan perusahaan.
5. Membuat Database peserta yang pernah mengikuti pelatihan.
6. Membuat group di salah satu sosial media agar mempermudah koordinasi antara LPK dan Dinas.
7. Memberikan pelatihan bagi purna PMI.

B.2. SASARAN 2 MEMBAIKNYA HUBUNGAN INDUSTRIAL

Dalam menekan angka pengangguran di Kabupaten Banjar, pemerintah daerah berupaya menciptakan hubungan industrial yang baik atau kondusif. Sengketa industrial adalah sengketa antar pekerja dengan pemberi kerja baik berupa pemutusan hubungan kerja, perselisihan hubungan industrial, perselisihan hak dan kewajiban. Untuk mengukur keberhasilan kinerja di atas Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar menetapkan penurunan sengketa industrial sebagai parameternya. Tahun 2021 terjadi sengketa industrial sebanyak 14 (Empat Belas) kasus, bila membanding dengan tahun 2020, tercatat sebesar 21 (Dua Puluh Satu) kasus sengketa industrial, hal ini menunjukkan terjadinya penurunan yang signifikan di Tahun 2021 dengan capaian sebesar 625%. Hal tersebut menunjukkan keberhasilan indikator persentase penurunan sengketa industrial yang menetapkan target 8% pada tahun 2021.

Jumlah kasus sengketa Industrial yang terjadi pada tahun 2021 adalah merupakan dari dampak dari PHK, PHI dan Hak, yang menyebabkan banyaknya perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja, diantaranya:

- PT. Palmina Utama Cintapuri (2 Kasus)
- PT. CIMB Niaga Auto Finance
- PT. Tjokro Bersaudara Banjarindo (3 Kasus)
- PT. Panca Teknik Gambut
- PT. Megah Karya Di Banjarbaru
- PT. Borneo Indo Tani (2 Kasus)
- PT. Daya Mitra Sejati
- CV. Akbar
- PT. Pharos Indonesia / PT. Nutrindo Jaya Abadi
- PT. Samudra Pacifik Marine

Adapun upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam penanganan hal tersebut di atas adalah dengan mengadakan pembinaan dan penyuluhan ke perusahaan untuk pencegahan kasus hubungan industrial dan memfasilitas penyelesaian pihak yang bersengketa dengan mekanisme bipartit dan mediasi serta melakukan pembinaan dan penyuluhan di perusahaan.

Tabel 3.6
Realisasi Indikator Hubungan Industrial Tahun 2021

Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
Persentase Penurunan Sengketa Industrial	8 %	50%	625 %

Berdasarkan data pada tabel 3.6 terget kinerja mengalami perubahan yang ditetapkan pada revisi Rencana Strategis SKPD, target ini berlaku di Tahun 2018 sampai dengan 2021, target ini ditetapkan mengingat kasus hubungan industrial ditahun 2021 relatif menurun dibandingkan 2020 yaitu sebanyak 14 kasus di tahun 2021.

Faktor pendorong keberhasilan sasaran ini adalah :

- 1) Ada 2 kegiatan yang mendukung sasaran Persentase Penurunan Sengketa Industrial sebagai berikut :
 - a. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
- 2) Penetapan indikator kinerja sasaran sudah berorientasi outcome dan dibuat secara berjenjang (cascading) sampai ke eselon terendah.
- 3) Seluruh indikator telah dilengkapi dengan baseline data dan cara penghitungannya.
- 4) Komitmen seluruh personil untuk meningkatkan kinerja.

Catatan penting dalam Pencapaian Sasaran :

- Kasus Hubungan industrial tidak bisa diprediksi.

Upaya perbaikan :

1. Mengadakan pembinaan dan penyuluhan ke perusahaan untuk pencegahan kasus hubungan industrial
2. Dikordinasikan dengan pihak terkait untuk diadanya mediator.
3. Menyelesaikan perselisihan dengan melalui mekanisme Bipartit dan mediasi
4. Melakukan pembinaan / penyuluhan di perusahaan.

5. Menyiapkan Konsultasi berupa Online

C. REALISASI ANGGARAN

Realisasi pelaksanaan anggaran yang dikelola Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Banjar tahun 2021 adalah sebesar Rp 4.409.867.227 (91,54%) dengan rincian untuk belanja tidak langsung Rp 2.894.591.042 (90,69%) dari total realisasi) dan belanja langsung sebesar Rp 1.420.338.185 (93,00%) dari total realisasi).

Di bandingkan dengan realisasi Tahun 2020 adalah sebesar Rp 4.231.874.486 (86,08%) dengan rincian untuk belanja tidak langsung Rp 3.017.412.922 (82,64% total realisasi) dan belanja langsung sebesar Rp 1.214.461.484 (96,02% dari total realisasi).

Realisasi total anggaran yang dilokasikan untuk program utama sebesar Rp 521.742.496 sedangkan realisasi anggaran belanja langsung program pendukung sebesar Rp 4.409.867.227 (91,54%) dari total anggaran yang dilokasikan untuk program pendukung sebesar Rp 4.931.609.723

Tabel 3.7
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021

No	Sasaran Strategis/Sasaran Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi (Capaian)	Target	Realisasi	% Realisasi
			(%)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya kesempatan lapangan Kerja	Persentase Peningkatan pencari kerja yang ditempatkan	3%	58%	1.933 %	458.658.100	431.853.064	94,15%
		Program Penempatan Tenaga Kerja	5%	91%	1,820%	238.349.200	224.313.570	94,11%
		Kegiatan : Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	700 Orang	955 Orang	136%	148.591.600	137.743.930	83,26%
		Sub Kegiatan : Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	700 Orang	955 Orang	136%	143.494.000	134.016.130	93,39%
		Sub Kegiatan : Job Fair/Bursa Kerja	5 Sekolah	5 Sekolah	100%	5.097.600	3.272.800	73,13%
		Kegiatan : Perlindungan PMI (Pra dan Purna	3%	3%	100%	56.975.900	55.125.570	96,75%

		Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota						
		Sub Kegiatan : Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	4 Orang	4 Orang	100%	56.975.900	55.125.570	96,75%
		Kegiatan : Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	3%	3%	100%	32.781.700	31.444.070	95,92%
		Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	5 Orang	5 Orang	100%	32.781.700	31.444.070	95,92%
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	1%	1%	100%	167.986.500	156.302.324	93,04%
		Kegiatan : Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	1%	1%	100%	95.749.600	89.551.040	93,53%
		Sub Kegiatan : Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	32 Orang	32 Orang	100%	95.749.600	89.551.040	93,53%
		Kegiatan : Pembinaan	1%	1%	100%	72.236.900	66.751.284	92,41%

		Lembaga Pelatihan Kerja Swasta						
		Sub Kegiatan : Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	16 Orang	22 Orang	137,5%	72.236.900	66.751.284	92,41%
		Kegiatan : Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	3%	3%	100%	52.322.400	51.237.170	97,93%
		Sub Kegiatan : Pelatihan Transmigrasi	32 Orang	32 Orang	100%	52.322.400	51.237.170	97,93%
2.	Membaiknya Hubungan Industrial	Penurunan Sengketa Hubungan Industrial	8%	50%	625%	96.223.400	89.889.432	93,42%
		Program Hubungan Industrial	100%	64%	64%	96.223.400	89.889.432	93,42%
		Kegiatan : Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	200 Orang	200 Orang	100%	61.677.700	57.333.940	92,97%
		Sub Kegiatan : Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	20 Perusahaan	26 Perusahaan	130%	31.475.000	29.112.870	92,50%
		Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga	90 Perusahaan/Orang	-	-	30.202.700	28.221.070	93,44%

		Kerja Serta Pengupahan						
		Kegiatan : Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	15 Kasus	14 Kasus	93,3%	34.545.700	32.555.492	94,24%
		Sub Kegiatan : Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	15 Kasus	14 Kasus	93,3%	34.545.700	32.555.492	94,24%
TOTAL BELANJA LANGSUNG UTAMA						554.881.500	521.742.496	94,02%
BELANJA LANGSUNG PENDUKUNG						4.931.609.723	4.409.867.227	89,42%
BELANJA TIDAK LANGSUNG						5.486.491.223		

C.1 ANALISA EFISIENSI

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaiannya kinerja mencapai atau lebih dari 100%. Terlihat bahwa 2 (dua) sasaran, menunjukkan pencapaian yang sama atau lebih dari 100%. Pada tabel berikut (3.7.1) dapat dilihat besar efisiensi anggaran pada setiap sasaran. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan lebih jauh, juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.7.1
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis/Sasaran Program	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja ($\geq 100\%$)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi (%) (4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kesempatan lapangan Kerja	Peningkatan pencari kerja yang ditempatkan	100%	94,15%	5,85%
		Program Penempatan dan Perluasan Kerja	100%	94,11%	5,89%
		Kegiatan : Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	100%	83,26%	16,74%
		Sub Kegiatan : Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	100%	93,39%	6,61%
		Sub Kegiatan : Job Fair/Bursa Kerja	100%	73,13%	26,87%
		Kegiatan : Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	100%	96,75%	3,25%
		Sub Kegiatan : Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	100%	96,75%	3,25%

		Kegiatan : Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	95,92%	4,08%
		Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	100%	95,92%	4,08%
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	100%	93,04%	6,96%
		Kegiatan : Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	100%	93,53%	6,47%
		Sub Kegiatan : Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	100%	93,53%	6,47%
		Kegiatan : Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	100%	92,41%	7,59%
		Sub Kegiatan : Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	100%	92,41%	7,59%
		Kegiatan : Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	97,93%	2,07%
		Sub Kegiatan : Pelatihan Transmigrasi	100%	97,93%	2,07%
2.	Membaiknya Hubungan Industrial	Penurunan Sengketa Hubungan Industrial	100%	93,42%	6,58%

		Program Hubungan Industrial	100%	93,42%	6,58%
		Kegiatan : Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	92,97%	7,03%
		Sub Kegiatan : Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	100%	92,50%	7,5%
		Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Serta Pengupahan	100%	93,44%	6,56%
		Kegiatan : Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	100%	94,24%	5,76%
		Sub Kegiatan : Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	94,24%	5,76%

D. TINDAK LANJUT ATAS EVALUASI LAPORAN KINERJA TAHUN 2021

D.1. EVALUASI KINERJA TAHUN 2021

Hasil evaluasi dari Inspektorat Kabupaten Banjar terhadap Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Banjar Tahun 2020 memperoleh nilai **80,02** dengan interpretasi predikat baik **A** maka pada tahun 2021 direkomendasikan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Banjar hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan perbaikan dan melengkapi dokumen rencana aksi dengan realisasi berupa informasi kinerja outcome ;
2. Adanya reward dan funisment untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut.

D.2. TINDAK LANJUT

Sebagai tindak lanjut rekomendasi dari Inspektorat, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Banjar telah melaksanakan upaya sebagai berikut:

- Melakukan perbaikan di Rencana startergis SKPD
-

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Capaian kinerja dalam rangka pencapaian pada Misi 2 (dua) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Banjar menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD yaitu

- Persentase Peningkatan Pencari Kerja yang ditempatkan
- Persentase Penurunan Sengketa Industrial.

Persentase Peningkatan Tenaga Kerja yang ditempatkan

Persentase Peningkatan Tenaga Kerja yang ditempatkan

Definisi Operasional adalah pencari kerja yang mencari pekerjaan yang ditempatkan dalam dunia kerja baik di Pemerintahan, BUMN, BUMD ataupun perusahaan dan tenaga kerja, untuk Tahun 2021 Target yang ditetapkan adalah sebesar 3% realisasi sebesar 58% dikarenakan pada Tahun 2021 ini terdapat kenaikan penempatan tenaga kerja yang ditempatkan sejumlah 363 orang dari kegiatan :

- Pekerja Kontrak waktu Tertentu (PKWT) 217 Orang
- Informasi Pasar Kerja (IPK) 146

Tahun 2021 penempatan tenaga kerja sebesar 363 orang.

Persentase Penurunan Sengketa Industrial

Persentase Penurunan Sengketa Industrial

Definisi Operasional adalah sengketa antar pekerja dengan pemberi kerja baik berupa Pemutusan Hubungan Kerja, perselisihan hubungan Industrial, perselisihan hak dan kewajiban pekerja dan pemberi kerja. Target tahun 2021 sebesar 8% realisasi sebesar 0,5%, tahun ini situasi hubungan industrial sangat cukup baik yaitu ada 14 kasus yang melaporkan sengketa hubungan industrialnya dibandingkan dengan Tahun 2020 ada 21 kasus yang mendaftarkan sengketa hubungan industrialnya dikarenakan pada tahun 2020 ini adanya pandemi covid 19 banyak perusahaan yang merumahkan atau mem PHK pekerja nya. Penekanan penurunan sengketa industrial ini didukung dengan kegiatan :

1. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota
2. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan di Daerah Kabupaten / Kota

Saran-saran

Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar tahun 2021 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja. penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang. penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

LAMPIRAN

.....
.....
.....